STRATEGI PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM) DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

Tesis

Diajukan oleh
PURWATI
151202804

Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2016

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM) DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen

Diajukan oleh
PURWATI
151202804

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2016

TESIS

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM) DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

Oleh :

PURWATI

NIM : 151202804

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pada tanggal.....

Dosen Penguji I	**Dosen Penguji II/Pembimbing**
Dr. Endy Gunanto, MM	**Dra Suci Utami Wikaningtyas, MM**

Dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Yogyakarta, ...

Mengetahui,

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

DIREKTUR

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, AK

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, ... 2016

PURWATI

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Teriring Salam dan doa semoga Allah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul "*Strategi Peningkatan Kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Dalam Program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberhajo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan*".
Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai derajat sarjana S2 pada Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Penyusunan Tesis ini dapat diselisaikan berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

1. Direktur Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di STIE Widya Wiwaha;
2. Drs. John Suprihanto, MIM., Ph.D, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
3. Ibu Dra. Suci Utami W., MM, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan masukan dan motivasi selama penyusunan Tesis ini.
4. Seluruh dosen Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu untuk menyusun dan menyelesaikan Tesis ini.
5. Konsultan Manajemen Wilayah 6 Jawa Timur selaku konsultan Program KOTAKU yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
6. Kepala Desa Sumberharjo dan Koordinator Lembaga Keswadayaan masyarakat yang telah membantu dalam proses penelitian.
7. Ibunda, saudaraku yang selalu memberikan motivasi,do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Teman-teman satu angkatan, khususnya satu kelompok, atas segala dorongan, semangat, kebersamaan dan kerja sama serta do'anya dari awal sampai akhir pendidikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Untuk itu saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga Tesis ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan pihak lain yang membutuhkan.

Yogyakarta, ...2016

PURWATI

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
INTISARI xii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 9
C. Pertanyaan Penelitian 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
BAB II LANDASAN TEORI 12
A. Strategi 12
B. Kinerja 13
C. Pengertian Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 16
D. Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh 18
E. Gambaran Desa Sumberharjo 18
F. Pendekatan Analisa SWOT 4K 19
BAB III METODE PENELITIAN 25
A. Rancangan Penelitian 25
B. Metode Pengumpulan Data 25
C. Metode Analisis Data 26

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 29
A. Deskripsi Data 29
1. Gambaran LKM 29
2. LKM desa Sumberharjo 47
3. Gambaran LKM sesuai AD LKM desa Sumberharjo 51
B. Pembahasan 70
1. Identifakasin Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman 70
2. Menentukan Posisi LKM 80
3. Strategi Peningkatan Kinerja LKM 82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 83
A. Kesimpulan..... 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN ……...

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penilaian kelembagaan LKM Sumber Makmur
Tabel 2.1 Penilaian kelembagaan LKM
Tabel 4.1 Tabel Anggota Pengurus LKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Tingkat Kehadiran Rapat LKM Tahun 2010
Gambar 1.2 Grafik Tingkat Kehadiran Rapat LKM Tahun 2011
Gambar 1.3 Grafik Tingkat Kehadiran Rapat LKM Tahun 2012
Gambar 1.4 Diagram Tingkat Kehadiran Rapat LKM Tahun 2013
Gambar 1.5 Diagram Tingkat Kehadiran Rapat LKM Tahun 2015
Gambar 1.6 Diagram Tingkat Kehadiran Rapat LKM Tahun 2016
Gambar 2.1 Gambaran Kerangka Konseptual SWOT
Gambar 3.1 Matrik SWOT
Gambar 4.1 Struktur Organisasi LKM
Gambar 4.2 Diagram Alir Kegiatan Pembentukan LKM
Gambar 4.3 Grafik Pengembalian Ekonomi Bergulir
Gambar 4.4 Diagram Tingkat Kehadiran Rapat LKM Tahun 2016
Gambar 4.5 Posisi LKM dalam Matriks SWOT-4K

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Sruktur organisasi pengelolaan KOTAKU

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

INTISARI

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM) DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

. Oleh : Purwati

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan mempunyai peran dan fungsi yaitu melakukan pengorganisasian warga secara partisipatif untuk merumuskan perencanaan, sebagai dewan pengambilan keputusan, mempromosikan dan menegakkan nilai luhur (jujur,adil,transparan), menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. LKM di desa Sumberharjo berdiri pada tahun 2009, di tahun 2015-2016 mengalami penurunan peran partisipasi atau tingkat kehadiran LKM dalam melakukan rapat rutin LKM sehingga berimplikasi terhadap capaian kinerja kelembagaan dan keuangan LKM.

Penelitlan ini disusun berdasarkan persepsi dan wawancara pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang merupakan wilayah yang ada Program Kota Tanpa Kumuh yang mana Lembaga tersebut mengalami penurunan kinerja organisasi LKM.

Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentivikasi faktor-faktor kekuatan,kelemahan,peluang dan hambatan pada kinerja LKM, (b) mengetahui posisi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan berdasarkan analisis SWOT. (c) Merumuskan strategi peningkatan kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Dari hasil wawancara di dapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LKM yaitu faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Bobot nilai kelemahan lebih besar di bandingkan dengan bobot nilai kekuatan, dan bobot nilai peluang lebih besar di banding ancaman. Dengan analisa SWOT 4K diperoleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) pada posisi kuadaran II memanfaatkan peluang dan mengurangi kelemahan yang ada. Strategi Peningkatan Kinerja LKM dalam program kota tanpa kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yaitu strategi stabilisasi yaitu perlu melakukan bersaing dalam mempertahankan peluang dan mengurangi kelemahan yang ada.

Implikasi hasil penelitian dan wawancara ini berdasarkan strategi stabilisasi perlu mengoptimalkan peran kepemimpinan LKM sebagai lembaga kolektif, melakukan pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kinerja keuangan dan memonitor kinerja UPK, menyadari pentingnya loyalitas kinerja LKM,menyadari kerelawanan itu tidak ada honor, melakukan proses requetmen perangkat organisasi sesuai prosedur.

Kata Kunci: Strategi, Kinerja, analisis SWOT

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRACT

STRATEGY PERFORMANCE IMPROVEMENT AGENCY COMMUNITY SELF – RELIANSCE (ACSR) PROGRAM IN THE CITY WITHOUT SLUM VILLAGE SUMBERHARJO PACITAN DISTRICT PACITAN DISTRICT

, By: Purwati

Agency community self reliance (ACSR) in the village of Sumberharjo District of Pacitan Pacitan has a role and function is to organize citizens in a participatory manner to formulate plans, as board decision-making, promote and uphold the noble values (to be honest, fair, transparent), grow a variety of community development activities , ACSR in the village Sumberharjo established in 2009, in the years 2015-2016 decreased role of participation or attendance rate of ACSR in conducting regular meetings ACSR that has implications for the achievement of institutional and financial performance of ACSR.
This study is based on the perception and interview at the Agency for Community Self-Reliance (ACSR) Sumberharjo village District of Pacitan Pacitan which is a region that is Program Cities Without Slums which the Organization has decreased ACSR organizational performance.
This study aims to (a) identivication, factors strengths, weaknesses, opportunities and threats on ACSR performance, (b) determine the position of Community Self-Supporting Institutions (ACSR) Sumberharjo District of Pacitan village based on SWOT analysis. (C) Formulate a performance improvement strategy Community Self-Supporting Institutions (ACSR) in the Cities Without Slums program in the village Sumberharjo District of Pacitan Pacitan
From interviews in getting the factors affecting the performance of ACSR is factor strengths, weaknesses, opportunities and threats. Weight value greater weakness in comparison with the weight of the power value, and weight value of greater opportunities in the appeal threats. With 4K SWOT analysis obtained Community Self-Reliance Institute (ACSR) in the position of quadrant II take advantage of opportunities and minimize them. ACSR Performance Improvement Strategies in cities without slums program in the village Sumberharjo District of Pacitan Pacitan namely stabilization strategy which need to compete in maintaining opportunities and minimize them. Implications of the results of research and interviews based stabilization strategy needs to optimize the role of the leadership of ACSR as an institution of collective, do training in an effort to improve the quality of human resources, improve financial performance and monitor the performance of UPK, aware of the importance of loyalty performance of ACSR, realize volunteerism's no honor, the process requetmen the organization according to the procedure.

Keywords: Strategy, Performance, SWOT analysis

STIE Widyawiwaha Jangan Plagiat

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan Kemiskinan menjadi bagian yang penting di Negara Indonesia. Penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah saja akan tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka Penanganan kemiskinan tersebut di era tahun 2009 Pemerintah meluncurkan salah satu Program yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Suatu Program yang langsung melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan itulah lahirlah suatu Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai wadah aspirasi dalam membantu penanggulangan kemiskinan di desa/Kelurahan.

Pergantian Kepemimpinan di Indonesia pada tahun 2015, tentunya memberikan dampak arahan kebijakan yang berbeda pula, yaitu Pemerintah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan pemukiman adalah tercapainya kawasan kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) persen melalui penanganan kawasan kumuh seluas 38,431 ha. Untuk itu seluruh Program Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PURR) dalam kurun waktu 5 tahun kedepan akan di fokuskan untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni hingga tercapai 0 ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu Ditjen Cipta Karya menginisiasi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan pemukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). *(OSP 6 Jawa Timur, 2016*).

Program Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi di seluruh Indonesia. Cakupan Lokasi berdasarkan kategori kegiatan adalah " kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan Kabupaten/Kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastukutur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada Kota/ Kabupaten terpilih melalui kritria tertentu, kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh Kelurahan dan atau kawasan/ Kcamatan Perkotaan di luar kelurahan/ desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk kawasan pemukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh". Program Kota Tanpa Kumuh merupakan Program kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dimana masyarakat dilibatkan dalam pelaku pembangunan. Melalui Lembaga Keswadayaan masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa ini Lembaga Keswadayaan Masyarakat berperan penting dalam keterlibatan warga dalam mensukseskan Program penanggulangan kumuh.

Desa Sumberharjo berdasarkan arahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan, merupakan desa yang terpilih sebagai kriteria pencegahan kumuh di desanya. Desa Sumberharjo terdiri dari 2 Rukun Warga dan 13

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Rukun Tetangga. Sedangakan Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) di desa Sumberharjo mempunyai nama yaitu Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sumber Makmur. LKM ini berdiri pada tahun 2009, dan memiliki 13 Pimpinan Kolektif.

Proses pembangunan LKM melalui pola kepemimpinan masyarakat berbasis nilai kemanusiaan, dengan demikian, LKM menjadi sarana sinergi masyarakat untuk memimpin pengorganisasian potensi dan sumber daya masyarakat warga dalam mencapai tujuan bersama yang diharapkan dan tetap mempertahankan keberadaannya sebagai pelaku yang mandiri. LKM diperlukan ketika masyarakat sepakat untuk menumbuhkembangkan kembali transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kontrol sosial dan partisipasi yang berlandaskan kejujuran, keikhlasan/kerelawanan, keadilan dan keberpihakan pada warga miskin, sebagai pondasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman di wilayah mereka sendiri. Terkait dengan Program Kota Tanpa Kumuh, peran LKM merupakan komponen yang penting dalam mensukseskan tujuan Program Kota Tanpa Kumuh, karenanya prinsip dasar dan target fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diantaranya adalah peran LKM.

LKM berdiri pada tahun 2009, awal berdirinya karena perlunya penanggulangan kemiskinan yang di awali dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Kemudian pergantian Program di tahun 2015 dengan nama P2KP (Program Peningkatan Kwalitas Permukiman). Dan di tahun 2016 nama programpun berganti menjadi kota

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

tanpa kumuh (kotaku). Dari pergantian program, LKM mengalami perubahan pola pikir dari penanganan kemiskinan berubah menjadi penanganan kumuh. Keberlajutan programpun menjadikan LKM perlu mempunyai kinerja yang baik. Kinerja LKM dikatakan baik dan maksimal apabila mencapai beberapa indikator yaitu: Institutional Development (IDF) atau tingkat perkembangan organisasi LKM pada posisi madani, sesuai SOP tingkat perkembangan organisasi LKM yang optimal dengan nilai >75% yaitu kategori madani,sedangkan tingkat level ini dengan nilai kategori yaitu di atas 300.

Kurun waktu Enam bulan ini LKM mengalami masalah yaitu tingkat pengembalian ekonomi bergulir yang rendah yang mengakibatkan cadangan Biaya Operasional (BOP) di LKM semakin rendah sehingga BOP yang seharusnya untuk menumbuh kembangkan rapat-rapat koordinasi dalam peran LKM mulai menurun, tingkat kehadiran/ partisipasi LKM mulai rendah , sehingga tingkat kinerja LKM mulai melemah. Disisi lain Pelaku yang terlibat dalam kepengurusan LKM banyak yang baru dan belum pernah pengalaman di bidang pemberdayaan.

Usia LKM dengan 7 tahun harusnya sudah mencapai tingkat mandiri yang maksimal, akan tetapi hasilnyapun belum dirasakan maksimal. Beberapa indikator yang menjadi masalah kinerja dalam Lembaga Keswadayaan Masyarakat yaitu capaian kehadiran Pertemuan LKM yang cukup rendah kurang dari 75% , dari sejumlah total di kepengurusan LKM beserta Unit Pengelola ada 18 orang, akan tetapi dalam kurun satu tahun ini kehadiran tidak mencapai apa yang diharapkan Program. Capaian Partisipasi Kinerja LKM.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Desa Sumberharjo dinilai cukup rendah, dimana perbandingan tingkat kehadiran dari tahun 2010 ke tahun 2016 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Diagram Tingkat Kehadiran Rapat LKM

Sumber : Data Daftar hadir di sekretariat LKM

Gambar 1.2
Grafik Tingkat Kehadiran Rapat LKM

Sumber : Data Daftar hadir di sekretariat LKM

Gambar 1.3
Grafik Tingkat Kehadiran Rapat LKM

Sumber : Data Daftar hadir di sekretariat LKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Gambar 1.4
Grafik Tingkat Kehadiran Rapat LKM

Sumber : Data Daftar hadir di sekretariat LKM

Gambar 1.5
Grafik Tingkat Kehadiran Rapat LKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Sumber : Data Daftar hadir di sekretariat LKM

Gambar 1.6
Grafik Tingkat Kehadiran Rapat LKM

Sumber : Data Daftar hadir di sekretariat LKM

Gambar 1.7
Grafik Tingkat Kehadiran Rapat LKM

Sumber : Data Daftar hadir di sekretariat LKM

Dari data pada diagram diatas dapat digunakan sebagai data pembanding tingkat kehadiran LKM, dimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada penurunan tingkat kehadiran pada tahun 2016. Ditahun 2010 tingkat kehadiran LKM lebih dari 75%, di tahun 2013 tingkat kehadiran lebih dari 70%, dan di tahun 2016 tingkat kehadiran kurang dari 70% Untuk indikator selanjutnya adalah capaian penilaian kinerja LKM pada tiga bulanan, yang dinilai pada bulan maret tahun 2016 hasilnya belum maksimal yaitu:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 1.1
Penilaian kelembagaan LKM Sumber Makmur

BIDANG / SUMBERDAYA ORGANISASI	ASPEK	TOTAL NILAI	SKOR
STATUTA ORGANISASI	Visi-Misi	275	3.44%
	Struktur Organisasi	275	3.44%
KE PEMIMPINAN	Legitimasi Pemilihan Anggota BKM	300	2.50%
	Pengambilan Keputusan	325	2.71%
	Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	300	2.50%
	Mekanisme Minta Usulan Masyarakat	275	2.29%
	Partisipasi Anggota BKM	250	2.08%

BIDANG / SUMBERDAYA ORGANISASI	ASPEK	TOTAL NILAI	SKOR
	Pertemuan BKM	250	2.08%
SISTEM MANAJEMEN	Perencanaan	275	2.75%
	Monitoring Evaluasi	250	2.50%
	Dokumentasi Informasi	275	2.75%
	Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM)	275	2.75%
	Penerima Manfaat Kegiatan/ Program	275	2.75%
SUMBERDAYA KEUANGAN	Sumber pendanaan	200	1.25%
	Rencana Keuangan	250	1.56%
	Laporan Keuangan	300	1.88%
	Pertanggungjawaban	300	1.88%
SUMBERDAYA MANUSIA	Pengembangan kapasitas	225	5.63%
	Kaderisasi	250	6.25%
HUBUNGAN EKSTERNAL	KSM	275	3.44%
	Masyarakat	300	3.75%
	Pemerintah	300	3.75%
	Organisasi non-pemerintah	200	2.50%
TOTAL SKOR ORGANISASI		**6200**	**66.42%**
HASIL PENILAIAN :		**Mandiri**	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Melihat tabel tersebut di atas bahwasanya nilai tingkat perkembangan LKM desa Sumberharjo adalah 66,42% seharusnya dalam periode LKM selama 7 tahun sudah pada kategori menuju madani, ataupun jika mandiri nilainya di atas 70%. Dengan melihat tingkat perkembangan yang sangat minim di LKM Desa Sumberharjo, maka perlu ditinjau ulang apa yang menjadi kelemahan LKM.

Dengan melihat tersebut diatas maka diperlukan peningkatan kinerja LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dengan strategi yang handal sehingga peran LKM berfungsi dengan optimal dan mempunyai andil dalam penanggulangan kumuh di desa Sumberharjo.

Berangkat dari dasar di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian 'Strategi Peningkatan Kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan'.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam Program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam Program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
2. Berada di posisi manakah Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan berdasarkan analisis SWOT.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3. Bagaimana strategi peningkatan kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam Program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal yang terkait dengan peningkatan kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam Program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Yaitu antar lain ;

1. Mengidentifikasi factor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam Program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
2. Mengetahui posisi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan berdasarkan analisis SWOT.
3. Merumuskan strategi peningkatan kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam Program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Desa Sumberharjo dan LKM

   Sebagai bahan masukan untuk evaluasi kinerja LKM dalam membantu menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja LKM

2. Bagi Peneliti

   Memperoleh pengalaman dan pengembangan wawasan dalan menentukan strategi yang efektif untuk peningkatan kinerja pendampingan program pemberdayaan

3. Bagi ilmu pengetahuan

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian sejenis dan dapat pula dikembangkan lebih lanjut.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut A.Halim Strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumberdaya (Bobsusanto:2015). Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Robbins, (dalam Kusdi, 2009:87) "Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut".

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Managemen strategi

Menurut Pearce dan Robinson (1997) Manajemen strategis adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulation) dan pelaksanaan (implementation) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi". Samuel dan Paul J Peter

mendefinisikan manajemen strategik sebagai suatu proses interaktif dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi secara tepat dengan menyesuaikan kondisi lingkungannya.

B. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai: "ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu". Sedangkan menurut Mahsun (2016.h.25) mengatakan kinerja (*performance*) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu program kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja disebut dengan performance measurement (Bernardin dan Rusel dalam Gomes (1999:146) (dalam Rahmawati Halim, 2014) mendefinisikan kinerja (performance outcomes) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan pengukuran kinerja adalah sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan/hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2000:5).

Menurut Yuwono et al (dalam Gita Dinarianti, 2016) pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang terdapat dalam perusahaan atau organisasi. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan pengaruhnya berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi,2001).

Menurut Mahsun (2016.h.26) terdapat elemen pokok pengukuran kinerja antara lain yaitu menetapkan tujuan, sasaran, strategi organisasi, merumuskan indikator dan ukuran kinerja, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi serta evaluasi kinerja.

Jenis indikator kinerja menurut Mahsun (2016.h.31) meliputi Indikator input , indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator manfaat. indikator dampak.

Indikator kinerja yang di laksanakan pada LKM di tahun 2009-2015 memakai indikator input, proses, dan output. Sedangkan di tahun 2016 dalam program Kota Tanpa Kumuh ini indikator yang di terapkan dalam kinerja yaitu indikator kinerja input, proses, output dan oucome.

Menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Yuwono et al (2002) menyebutkan bahwa manfaat sistem pengukuran kinerja organisasi adalah:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

a. Menelusuri kinerja yang menjadi harapan pelanggan sehingga akan membawa organisasi lebih dekat kepada pelanggan dan membuat seluruh komponen personal organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.

b. Memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.

c. Mengidentifikasi berbagai macam pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan.

d. Membuat tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.

Pengukuran kinerja membantu organisasi untuk merefleksikan hasil yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja juga mampu membantu organisasi dalam pembelajaran untuk memahami masyarakat yang dilayani demi tercapainya optimalisasi kepuasan masyarakat yang berdampak pada efektifitas tujuan organisasi. Rogers (1994) dalam Gita Dinarianti (2016) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

a) Faktor personal/individu yang meliputi : pengetahuan, ketrampilan/skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b) Faktor kepemimpinan yang meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.

c) Faktor sistem yang meliputi sistem kerja, fasilitas terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.

d) Faktor sistem yang meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi.

e) Faktor kontekstual/situasional yang meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

3. Pengukuran kinerja LKM

Pengukuran kinerja LKM di ukur berdasarkan penilaian organisasi LKM yaitu matrik perkembangan organisasi LKM. Penilaian perkembangan organisasi LKM diatur dalam standart operasional prosedur (SOP) yaitu penilaian perkembangan organisasi LKM dengan kategori perkembangan organisasi awal dengan nilai kurang atau sama dengan 25 persen, kategori berdaya dengan nilai 25 hingga 50 persen, kategori mandiri dengan nilai 50-75 persen, menuju madani dengan nilai lebih dari 75 persen. Pengukuran kinerja optimal apabila mencapai diatas 75 persen, dengan kata lain menuju mandiri. SOP Penilaian kelembagaan LKM seperti pada tabel dibawah ini

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 2.1
Penilaian kelembagaan LKM

Total Skor	Tahap Perkembangan BKM/LKM	Tafsir Perkembangan BKM/LKM
≤ 25%	Awal	BKM/LKM baru memulai kegiatan dan membangun hubungan baik ke dalam antaranggota maupun ke luar. Bagi BKM/LKM yang telah bertahun-tahun berdiri, perlu mempertimbangkan kembali tujuan keberadaannya.
> 25% – 50%	Berdaya	BKM/LKM telah memiliki tujuan dan rencana serta perangkat organisasi. BKM/LKM sudah memiliki basis yang cukup kuat untuk berkembang, namun masih sangat perlu meningkatkan kinerja untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi.
> 50% – 75%	Mandiri	BKM/LKM telah memiliki gagasan inovatif dan pandangan ke depan.
> 75%	Menuju Madani	BKM/LKM sudah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk mempertahankan eksistensinya menuju kemandirian dan keberlanjutan.

STIE Widya Wiwaha Jangan Plagiat

C. Pengertian Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

LKM adalah dewan pimpinan Kolektif masyarakat di tingkat desa/Kelurahan untuk menggalang kekuatan dan potensi sumber daya, baik

yang dimiliki masyarakat maupun dengan mengakses berbagai peluang sumber daya dari luar (chanelling Program) dalam upaya mengagulangi kemiskinan dan pembangunan pemukiman di wilayahnya. LKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke seluruh desa/Kelurahan serta memperjuangkan kebutuhan warganya di tingkat Kelurahan/Desa dalam musrembang.(PMU-PNPM-MP:2008)

D. Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan Program Mendukung menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik,Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh (OSP 6 Jawa Timur :2016)

E. Gambaran Desa Sumberharjo

Desa Sumberharjo merupakan salah satu dari 20 Desa di wilayah Kecamatan Pacitan yang terletak 2 Km ke Utara dari kota Kecamatan, Desa Sumberharjo mempunyai luas wilayah seluas 182.693 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Sumberharjo. Batas Desa Sumberharjo yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambong, Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bangunsari, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pucangsewu, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sedeng Kecamatan Pacitan. Desa Sumberharjo hanya terdiri dari 2 dusun, dengan jumlah penduduk 1.665 Jiwa atau 513 KK. (Profil Desa Sumberharjo:2015)

F. Pendekatan Analisa SWOT 4K

1. Tentang Analisis Swot

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Analisis SWOT atau atau sering juga di sebut TOWS sering digunakan di Indonesia, pada dasarnya analisis SWOT-K bersifat kualitatif. Dalam penyusunannya lebih banyak mengandalkan pada keunggulan, pengalaman institusi manajemen. dalam menganalisa terhadap suatu masalah dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Penulis menggunakan pendekatan Matriks SWOT 4K, sesuai dengan namanya, memiliki empat kuadran yang terbentuk oleh sumbu horizontal yang mencerminkan variable lingkungan internal perusahaan dan satu sumbu vertical yang mencerminkan lingkungan eksternal.

Separoh sumbu horisotal bernilai positif merupakan simbol kekuatan perusahaan, sedangkan separoh yang lain merupakan sumbu bernilai negatif yang merupakan representatif kelemahan perusahaan. Separuh sumbu vertical bernilai positif merupakan representative peluang bisnis, seangkan separuh lainnya bernilai negatif merupakan simbol ancaman bisnis (Suwarsono,2008;39).

a. Kuadran I terbentuk oleh potongan sumbu horizontal positif (kekuatan perusahaan) dan potongan sumbu vertical positif (peluang bisnis). Kuadran I di peroleh ketika nilai tertimbang kekuatan lebih besar dari nilai tertimbang kelemahan perusahaan dan saat yang sama nilai tertimbang peluang lebih besar dari pada nilai tertimbang ancaman bisnis. Dengan kata lain kuadran I terbentuk dari dua nilai positif.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Kuadran II terbentuk oleh potongan sumbu vertical positif (peluang bisnis) dan potongan sumbu horizontal negatif (kelemahan perusahaan). Kuadran II didapat jika nilai tertimbang peluang masih lebih besar dibanding nilai tertimbang ancaman bisnis dan saat yang sama nilai tertimbang kelemahan lebih besar daripada kekuatan perusahaan. Posisi perusahaan di kuadran II di bentuk oleh nilai positif dan satu nilai negatif.

c. Kuadran III terbentuk oleh potongan sumbu horizontal negatif (kelemahan perusahaan) dan potongan sumbu vertikal negatif (ancaman bisnis). Kuadran III diperoleh ketika nilai tertimbang kelemahan lebih besar dibanding nilai tertimbang kekuatan perusahaan dan di saat yang sama nilai tertimbang ancaman lebih besar daripada nilai tertimbang peluang bisnis. Kuadran III di bentuk oleh dua nilai negatif.

d. Kuadran IV terbentuk oleh potongan sumbu vertikal negatif (ancaman bisnis) dan potongan horizontal positif (kekuatan perusahaan). Kuadran IV didapat jika nilai tertimbang ancaman lebih besar daripada nilai tertimbang peluang bisnis dan saat yang sama nilai tertimbang kekuatan masih lebih besar disbanding nilai tertimbang kelemahan perusahaan. Posisi kuadran IV dibentuk oleh nilai negatif dan positif.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

e. Analisis SWOT digunakan untuk membandingkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, sedangkan faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan

2. Kerangka Konseptual Swot

Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Kerangka teori atau kerangka pikir atau landasan teori adalah kesimpulan dari tinjauan puskata yang berisi tentang beberapa konsep teori yang dipergunakan atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan Kerangka Teori diatas disusunlah Kerangka Konsep yaitu suatu bagan yang menggambarkan hubungan antar konsep yang akan diteliti. Ada lima langkah untuk melakukan analisis situasi perusahaan, antara lain:

a. Mengevaluasi seberapa baik strategi yang saat ini sedang bekerja. Ini dilakukan dengan melihat kinerja strategi perusahaan dan menentukan apakah berbagai strategi logis konsisten.

b. Melakukan analisis SWOT. Kekuatan perusahaan adalah hal yang penting karena mereka dapat berfungsi sebagai pondasi utama untuk strategi. Kelemahan perusahaan adalah penting karena mereka dapat mewakili kerentanan perusahaan yang perlu untuk dikoreksi. Peluang dari luar dan ancaman ikut bermain karena strategi yang baik bertujuan yang menangkap peluang yang menarik dan bertahan terhadap ancaman yang berguna bagi kesejahteraan perusahaan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c. Mengevaluasi posisi biaya perusahaan dibandingkan terhadap pesaing (menggunakan konsep analisis biaya strategis dan biaya kerja jika perlu). Strategi harus selalu bertujuan menjaga biaya cukup sejalan dengan saingan untuk memelihara kemampuan perusahaan secara menyeluruh

d. Mengakses posisi kompetitif perusahaan dan kekuatan kompetitif. Langkah ini melihat bagaimana sebuah perusahaan saingan cocok pada faktor penentu utama keberhasilan kompetitif. Peringkat kekuatan kompetitif menunjukkan di mana letak sebuah perusahaan yang kuat dan lemah; sebagai aturan, strategi bersaing sebuah perusahaan harus dibangun di atas kekuatan kompetitif dan merupakan upaya untuk menopang daerah kompetitif yang rentan. Sebuah perusahaan memiliki potensi terbaik untuk serangan di daerah di mana perusahaan tersebut itu kuat dan saingan lemah.

e. Menentukan beberapa isu strategis dan masalah perusahaan yang perlu dibahas. Tujuan dari langkah analitis untuk mengembangkan agenda strategi yang sempurna dengan menggunakan hasil dari kedua analisis situasi perusahaan dan industri dan analisis kompetitif. Langkah ini membantu manajemen menarik kesimpulan tentang kekuatan dan kelemahan strategi dan menentukan beberapa isu pembuat strategi yang perlu dipertimbangkan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Gambar 2.1
Gambaran Kerangka Konseptual SWOT

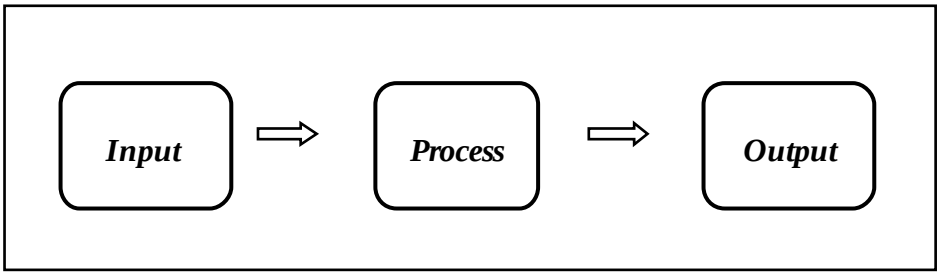

Dari Gambar 2.1 diatas dapat diketahui bahwa gambaran konseptual SWOT meliputi *input, process,* dan *output* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Input* merupakan strategi perusahaan saat ini, beserta faktor internal (*strength, weakness*) faktor eksternal (*opportunity, threat)* yang mempengaruhinya.
2. *Process* merupakan beberapa langkah analisis SWOT.
3. *Output* merupakan strategi baru dan solusi dari hasil analisis SWOT yang dilakukan untuk mengembangkan potensial perusahaan lebih maju.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan/Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari kata-kata seseorang atau yang telah diamati.

B. Metoda Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif (Sukmadinata, 2010:216). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono,2011:233). Wawancara yaitu memperoleh data melalui tanya jawab dengan pihak terkait sesuai yang telah ditetapkan. Informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Desa Sumberharjo
b. Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa Sumberharjo
c. Tokoh Masyarakat Desa Sumberharjo (Ketua BPD)
d. Penerima Manfaat Program 1 orang
e. Perwakilan Perempuan (Ketua PKK)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

C. Metoda Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini mengunakan metoda SWOT-4K terdiri dari analisis kekuatan *(Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats)*. Langkah pokok yang digunakan untuk menyusun matriks SWOT-4K adalah sebagai berikut :

a. Menyusun kekuatan , kelemahan internal dan menyusun peluang dan ancaman dari eksternal. Indikator yang telah jelas identifikasinya dikelompokkan ke dalam kategori sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau hambatan bukan sekedar sebagai indikator lingkungan internal dan eksternal.

b. Memberi bobot pada masing-masing indikator dengan cara membandingkan peran satu indikator tertentu dengan indikator yang lainnya. Pemberian bobot lebih banyak berkaitan dengan pembanding besar kecilnya peran antar indikator. Bobot maksimum yang diberikan untuk setiap kategori adalah 1 atau 100 persen. Bobot maksimum tersebut kemudian didistribusikan pada semua indikator dalam kategori tersebut sesuai dengan derajat pengaruh masing-masing indikator.

c. Memberi penilaian terhadap besar kecilnya sumbangan dan hambatan yang diberikan oleh masing-masing indikator terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penilaian ini lebih langsung menunjuk pada perbandingan peran antar indikator, penilaian ini lebih langsung menunjuk pada sumbangan atau hambatan yang hendak diberikan oleh masing-masing indikator pada pencapaian kinerja organisasi. Perlu membedakan apakah

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing kategori variabel bersifat positif atau negatif terhadap kinerja organisasi. Penilaian pada masing-masing indikator biasanya dilakukan dengan memberikan skor mulai dari 1 sampai dengan 5 untuk kategori variabel kekuatan dan peluang, karena kedua kategori tersebut memiliki hubungan positif dengan kinerja organisasi. Penilaian diberikan dengan angka -1 sampai dengan -5 untuk kategori variabel kelemahan dan ancaman karena kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif dengan angka positif akan tetapi diberlakukan sebagai pengurang ketika menentukan posisi kuadran organisasi.

d. Menghitung nilai tertimbang dari masing-masing indikator dalam satu kategori variabel dan menjumlahkannya. Nilai tertimbang merupakan hasil perkalian antara bobot dan nilai masing-masing indikator. Setelah nilai tertimbang masing-masing indikator ditemukan, selanjutnya nilai tertimbang tersebut dijumlahkan. Hasil akhirnya adalah total nilai tertimbang untuk semua kategori variabel.

e. Menentukan posisi organisasi dalam salah satu kuadran dari keempat kuadran yang dimiliki dengan matrik SWOT-4K dan sekaligus menentukan strategi yang seyogyanya dilaksanakan berdasarkan posisi yang dimiliki tersebut. Dihitung terlebih dahulu selisih nilai tertimbang antara variabel kekuatan dan kelemahan serta sekaligus nilai tertimbang antara peluang dan ancaman. Jika selisih nilai positif, maka posisi perusahaan berada di kuadran I, jika nilai tertimbang peluang lebih besar dari ancaman dan saaat yang sama nilai tertimbang kekuatan lebih kecil

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dari kelemahan maka perusahaan berada di kuadran II. Jika selisih kedua nilai tersebut negatif, maka posisi perusahaan berada di kuadran III. Jika tertimbang peluang lebih kecil dari ancaman dan di saat yang sama nilai tertimbang kekuatan lebih besar dari pada kelemahan, maka posisi organisasi berada di kuadran IV.

Gambar 3.1
Matrik SWOT

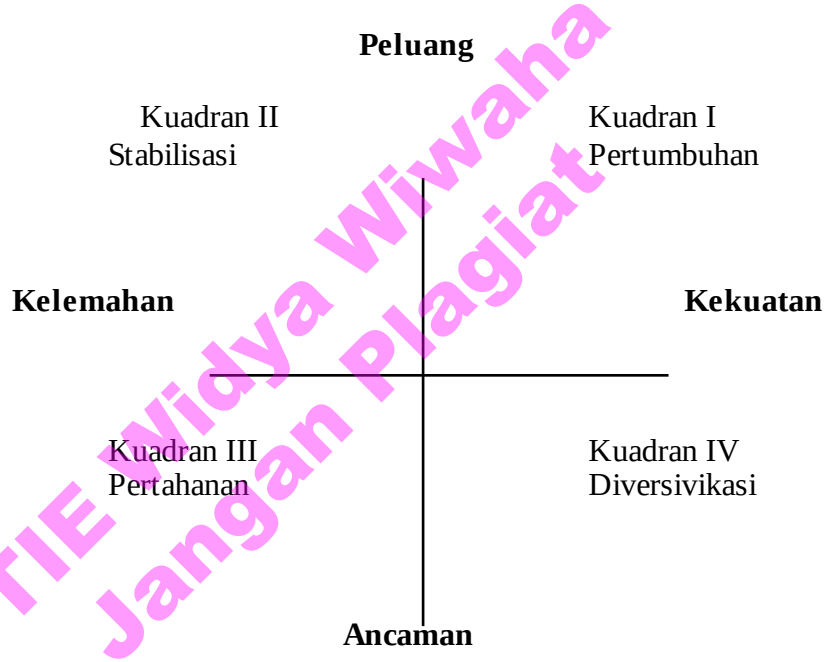

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Sumber : Suwarsono 2008:39

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

Lembaga Keswadayaan Masyarakat merupakan lembaga yang awal mulanya berdiri yaitu dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sesuai amanah Peraturan Presiden no 13 tahun 2009 tentang Koordinasi penanggulangan kemiskinan. Dalam struktur program penanggulangan kemiskinan dalam hal ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan terdapat Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Maka didirikanlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di desa Sumberharjo pada tanggal 12 September 2009.

Berdasarkan petunjuk teknis pengembangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah singkatan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang merupakan nama "jenerik" atau istilah untuk suatu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu ***himpunan masyarakat warga*** di tingkat Kelurahan/ Desa. Dengan kalimat lain dapat dikatakan LKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat elurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

LKM disamping sebagai dewan pengambilan keputusan juga untuk menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

maupun yang bersumber dari luar (*channeling)*, dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah desa/kelurahan. LKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan desa/kelurahan serta memperjuangkan kebutuhan warga di tingkat desa/kelurahan dalam musbangdes/kelurahan.

Dalam Program Kota Tanpa Kumuh yaitu Lembaga Keswadayaan Masyarakat terletak dalam garis pelaksanaan, sesuai dengan pedoman umum Kota Tanpa Kumuh, yang diatur dalam surat edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya no 40/SE/DC/2016. Tata Peran Pelaku Program Kota Tanpa Kumuh.

a. Tingkat Nasional

Sesuai penjelasan di sub bab sebelumnya, pelaku utama Program KOTAKU di tingkat nasional terdiri dari Pokja PKP Nasional, CCMU, PMU, dan Satker Pusat. Tugas/fungsi masing-masing pelaku tersebut dijabarkan di bawah ini:

1) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Nasional

   a) Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi,dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman,yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan nasional;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b) Menyiapkan langkah-langkah koordinasi, sinkronisasi kegiatan,pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

c) Menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;

d) Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBN) khususnya di tingkat nasional antar sector antar kementerian untuk percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”

e) Mengkoordinasikan penyelesaian isu-isu aktual lintas kementerian/lembaga terkait penanganan permukiman kumuh;

f) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan penanganan permukiman kumuh di kota tertentu yang permasalahannya terkait urusan pusat;

g) Memfasilitasi penerapan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional;

h) Memonitor penggunaan pendekatan kesetaraan gender dan pencapaiannya di seluruh kebijakan dan proyek;

i) Menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

j) melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Bappenas dan KemenPUPR/PMU

k) melaksanakan tugas-tugas lain yang dimandatkan oleh Bappenas dan KemenPUPR/PMU.

2) Central Collaboration Management Unit (CCMU)

a) Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan di daerah;

b) Pengelolaan data/ informasi;

c) Sinkronisasi perencanaan dan pemrograman di tingkat nasional;

d) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan

e) Manajemen kolaborasi.

3) Project Management Unit (PMU)

a) membantu pelaksanaan tugas *Executing Agency* dalam penyelenggaraan program secara nasional;

b) melakukan koordinasi dengan Pokja PKP Nasional dalam penyelenggaran program secara nasional;

c) mengkoordinir seluruh pelaku KOTAKU dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

d) mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBN) khususnya antar sektor dalam lingkup Kementerian

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

PUPR untuk percepatan pencapaian target "kota tanpa permukiman kumuh";

e) melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan;

f) melakukan pengelolaan keuangan pinjaman di tingkat pusat dan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program;

g) menerbitkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial serta pedoman-pedoman pendukungnya, memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di seluruh tahapan program,menyelenggarakan konsultasi publik terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;

h) melakukan pengendalian teknis pelaksanaan program, *monitoring*, ujipetik dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan pencapaian *loancovenance* dan pencapaian kinerja pelaksanaan program; dan menyusun laporan secara rutin kepada *Executing Agency*.

4) Satker Pusat

a) melakukan pengadaan jasa konsultan;

b) melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peruntukan dalam DIPA;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c) membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *e-monitoring*;

d) melakukan koordinasi dengan Satker di provinsi dan kabupaten/kota; dan melaporkan hasil pelaksanaan anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;

e) membantu PMU dalam melaksanakan dan mengendalikan program.

b. Tingkat Provinsi

Pelaku utama pelaksanaan KOTAKU di tingkat provinsi terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pokja PKP Provinsi, dan Satker Provinsi. Tugas masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di Provinsi

a) mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;

b) membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;

c) membentuk Pokja PKP Provinsi;

d) mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD Provinsi) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman yang skala penanganannya sesuai kewenangan provinsi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

e) mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Provinsi; dan melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Provinsi dengan RPJMN.

2) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi

a) menyusun peta jalan menuju perumahan dan permukiman layak huni, termasuk di dalamnya permukiman kumuh yang kemudian disahkan oleh Gubernur;

b) mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dari tingkat nasional;

c) memberi usulan kepada Pokja PKP Nasional terkait reformasi/pengembangan kebijakan yang diperlukan dari hasil identifikasi Pokja PKP Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;

d) mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

e) menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target "kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh";

f) mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target "kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh";

g) berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan penanganan permukiman kumuh di kota tertentu yang permasalahannya

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

terkait urusan provinsi dan memastikan terintegrasinya perencanaan tingkat provinsi dan kota;

h) mengendalikan, memonitor dan supervisi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kabupaten/kota;

i) mengadvokasi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih efektif, mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

j) melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Pokja PKP Nasional

k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Nasional.

Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat provinsi.

3) Satker Provinsi

a) Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;

b) Melakukan pengadaan Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota dan fasilitator;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c) melakukan pembayaran gaji Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota dan Fasilitator beserta BOP tim fasilitator;

d) melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Provinsi;

e) menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI), terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana BDI bila dana BDI ditempatkan di DIPA Provinsi;

f) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program;

g) mengkaji dan memonitor UKL/UPL dan LARAP dan instrument lingkungan dan sosial lainnya yang diajukan oleh Satker Kabupaten/Kota;

h) mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten/kota;

i) membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *E-Monitoring*;

j) mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;

k) menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait Program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan

l) melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Provinsi;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat provinsi.

c. Tingkat Kabupaten/kota

Pelaku utama KOTAKU di tingkat kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP Kabupaten/Kota, dan Satker Kabupaten/Kota. Tugas masing-masing pelaku tingkat kota adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di kabupaten/kota
   a) mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
   b) menyiapkan peraturan pendukung terkait penanganan permukiman kumuh (SK kumuh, Perda kumuh, dll)
   c) membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya, termasuk dalam memonitor kemajuan capaian kinerja program di tingkat kabupaten/kota dan pengelolaan lingkungan dan sosial;
   d) membentuk Pokja PKP Kabupaten/Kota;
   e) mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

f) mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupaten/Kota;

g) memastikan RPJMD Kabupaten/Kota memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMD Kabupaten/Kota dengan rencana penanganan permukiman kumuh RP2KP-KP/SIAP;

h) melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN;

i) menunjuk dan mengajukan usulan pejabat Satuan Kerja kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (bila diperlukan);

j) melakukan konsolidasi perencanaan, pendanaan, dan pendataan dari tingkat kabupaten/kota.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota

a) menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KP-KP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda BG, dll;

b) memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan masalah antar sektor/lembaga/tingkatan pemerintahan

dan dengan komunitas (termasuk fasilitator dan Tim Korkot) yang bersangkutan;

c) memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kota dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni;

d) mengidentifikasi kebutuhan reformasi/ pengembangan kebijakan dan mengkomunikasikannya ke Pokja Provinsi dan Nasional bila perlu;

e) menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kab/kota (RP2KP-KP/SIAP), termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensif. Penyusunan RP2KPKP/ SIAP dan memorandum program dilakukan secara partisipatif yang hasilnya minimal ditetapkan melalui SK Kepala Daerah;

f) menetapkan daftar lokasi sasaran;

g) menyampaikan surat persetujuan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;

h) memastikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;

i) mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

j) menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target "kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh";

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

k) mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

l) memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial dikabupaten/kotanya;

m) mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

n) memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PPM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan pencapaian hasil kepada Walikota/Bupati dan Pokja PKP Provinsi;

o) memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi;

p) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Provinsi;

q) Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat kabupaten/kota.

3) Satker Kabupaten/Kota

a) melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;

b) melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota, termasuk dengan Tim Korkot;

c) memonitor keefektifan proses partisipasi masyarakat;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

d) memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam RP2KP-KP/SIAP, Desain Kawasan/DED, dan RPLP/NUAP;

e) melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial di setiap tahapan proyek, kemudian memonitor dan evaluasi penerapannya;

f) mengesahkan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disetujui Pokja PKP Kabupaten/Kota;

g) menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi bila dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi di tempatkan di DIPA Kabupaten/Kota;

h) mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator termasuk melakukan evaluasi kinerjanya;

i) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;

j) mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten/kota;

k) membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *E-Monitoring*;

l) mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

m) menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.

n) melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Kabupaten/Kota

o) Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanakan program di tingkat kabupaten/kota.

d. Tingkat Kecamatan

Perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat merupakan pemegang peran utama di tingkat kecamatan. Berikut ini tugas camat dalam program ini adalah:

1) mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
2) memastikan Renstra Kecamatan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi Renstra Kecamatan dengan rencana penanganan permukiman kumuh;
3) melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam Renstra Kecamatan dengan RPJM Kabupaten/kota;
4) berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa/lurah yang ada di wilayah kerjanya;
5) bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial di wilayah kerjanya;
6) membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

7) melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa dan BKM/LKM.

e. Tingkat Kelurahan

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, TIPP, KSM Permukiman, KPP, serta Relawan, dengan tugas/fungsi masing-masing unsur sebagai berikut:

1) Lurah/Kepala Desa

a) memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui program dapat tercapai dengan baik;

b) memastikan RPJMDes/RKP Kelurahan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMDes/RKP Kelurahan dengan rencana penanganan permukiman kumuh RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;

c) melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMDes/RKP Kelurahan dengan Renstra Kecamatan dan RPJM Kabupaten/kota;

d) berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat Kecamatan;

e) memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

f) memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam pelaksanaan program;

g) memfasilitasi penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, termasuk memonitor dan mengarsipkan dokumen terkait;

h) berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM, dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program;

i) berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan dan penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di daerahnya; dan

j) mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.

2) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

a) melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM;

b) membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan/Sosial/Ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegiatan;

c) mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;

d) memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial; dan

e) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L/S/E. BKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

memiliki perangkat UPS – UPK – UPL, yang tugas-tugasnya dirinci di Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat.

3) Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

a) melakukan pendataan di tingkat kelurahan maupun basis dalam penyusunan profil permukiman;

b) mengkoordinasikan proses perencanaan di tingkat masyarakat dan menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP/NUAP) beserta dokumen turunannya, dibantu oleh tim ahli perencanaan partisipatif (TAPP);

c) mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dan sosial ke dalam perencanaan;

d) melaksanakan uji publik hasil perencanaan kepada masyarakat; dan

e) melaksanakan proses konsultasi dan kolaborasi tingkat kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

a) menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya;

b) melengkapi proposal dengan instrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial;

c) mengelola dan melaksanakan kegiatan KOTAKU secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan prasarana dan

sarana yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; dan

d) detil tugas KSM di bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat.

5) Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

a) melaksanakan rencana O&P dan melaporkan kegiatan O&P, termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa;

b) memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial;

c) menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) desa Sumberharjo

Lembaga Keswadayaan Masyarakat desa Sumberharjo berdiri pada tanggal 12 September 2009 dengan anggota sejumlah 13 orang, yang dinamakan dengan Pimpinan Kolektif LKM. LKM di syahkan di notaris pada tanggal 6 Oktober 2009 di notaris Muhammad Yusuf,SH. Dalam Anggaran Dasar LKM, disebutkan bahwa LKM setiap tiga tahun mengadakan rembug warga pilihan Pimpinan kolektif LKM.

Desa Sumberharjo pada tahun 2012 melakukan pilihan ulang LKM, Kemudian disahkan/dicatatkan Notaris pada tanggal 18 Maret 2013 di notaris Sa'adan suryandari, SH, M.Kn. dengan nomer notaris No:

11/18/III/W/SS/2013. Dilanjutkan pada tahun 2015 seharusnya melakukan pemilihan ulang rembug LKM, akan tetapi proses rembug LKM diadakan pada tanggal 16 januari 2016.Peserta yang hadir pada proses pembentukan LKM di tingkat desa sejumlah 41 orang.

LKM mempunyai perangkat organisasi yaitu: Sekretariat terdiri 1 orang, Unit Pengelola Keuangan sejumlah 1 orang, Unit Pengelola Lingkungan sejumlah 1 orang, Unit Pengelola Sosial sejumlah 1 orang, Pengawas UPK sejumlah 1 orang, dan KSM sebagai Penerima manfaat. Adapun bagan struktur LKM Desa Sumberharjo sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi LKM

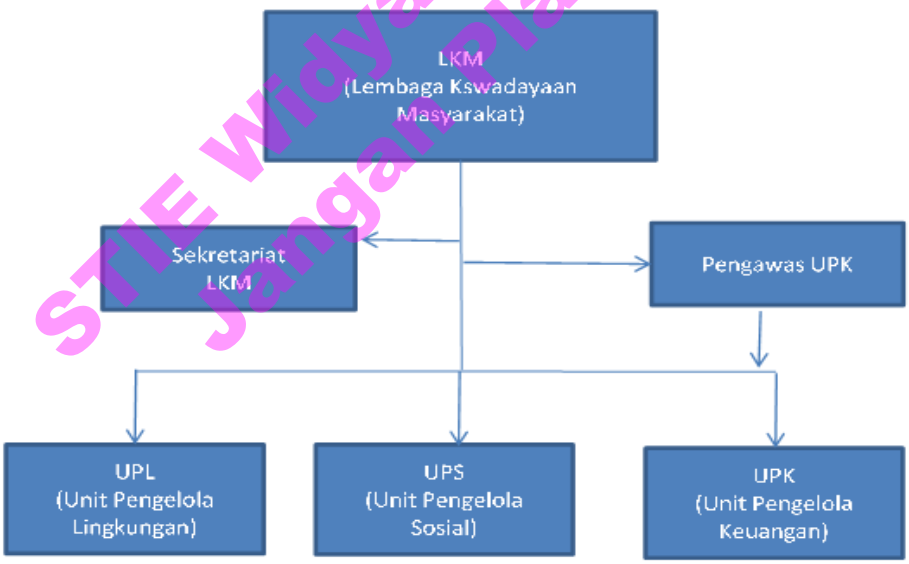

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Peran dan Fungsi LKM Desa Sumberharjo yaitu:

Peran utama LKM adalah :

a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan Perencanaan Jangka Menengah (3 tahun)

b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh
c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan;
d. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka
e. Mengembangkan jaringan LKM di tingkat kecamatan, kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya.
f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UP-UP LKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Fungsi LKM yaitu:

a. Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
b. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb);
c. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan;
d. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan;
e. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;

f. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat Desa; serta pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah.

Perangkat organisasi LKM terdiri dari :

a. Sekretariat, sebagai unsur pelaksana harian dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM. LKM desa Sumberharjo mempunyai satu orang sekretariat.
b. Pengawas, Pengawas UPK berjumlah tiga orang, diangkat untuk melakukan proses pengawasan, monitoring, evaluasi maupun audit internal kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM.
c. Unit Pengelola Keuangan (UPK), berjumlah satu orang dengan diangkat untuk mengendalikan keuangan dalam kegiatan ekonomi/perguliran dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM dan Pengawas UPK.
d. Unit Pengelola Lingkungan (UPL), terdiri satu orang, diangkat untuk mengendalikan kegiatan lingkungan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM
e. Unit Pengelola Sosial (UPS), terdiri satu orang dan diangkat untuk mengendalikan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia

Pada tahun 2016 Lembaga Keswadayaan Masyarakat melakukan pergantian program yaitu Kota Tanpa Kumuh. Dalam Kota Tanpa Kumuh

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

LKM melakukan penggalian visi-misi adapun visi misi LKM sebagai berikut :

Visi

Terbentuknya Desa sumberharjo yang sehat, aman, bersih, partisipatoris dan Sejahtera

Misi

1) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2) Menciptakan sarana prasarana yang memadahi
3) Membangun gotong-royong dan keamanan warga
4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

3. Lembaga Keswadayaan Masyarakat sesuai dengan Anggaran Dasar LKM desa Sumberharjo tahun 2013

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

PENDIRIAN, LEGALITAS, DAN KEPEMILIKAN

Pasal 6

Pendirian

LKM didirikan atas persetujuan, kesepakatan serta keputusan dari segenap lapisan masyarakat yang tinggal di Desa Sumberharjo, yang dilakukan melalui rembug warga secara berjenjang mulai dari rembug warga RT (rukun tetangga) sampai rembug warga Desa.

Pasal 7

Legalitas

1) Hasil kesepakatan masyarakat yang dirumuskan dalam AD ini selanjutnya di aktanotariskan

2) LKM merupakan organisasi masyarakat warga yang dipimpin secara kolektif, dan mendapatkan mandat dari warga untuk memimpin dan mewakili masyarakat/warga Desa yang bersangkutan.

3) LKM merupakan organisasi masyarakat warga berbentuk paguyuban

Pasal 8

Kepemilikan

1) LKM adalah milik seluruh masyarakat Desa Sumberharjo

2) Dana dan segala aset LKM merupakan milik warga masyarakat Desa Sumberharjo, bukan milik pribadi dan golongan.

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 9

1) LKM sebagai lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga Desa dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga

2) LKM sebagai wadah perjuangan dan wadah aspirasi warga masyarakat Desa, khususnya dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB VI

PERAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Peran

Peran utama LKM adalah :

a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan

(PJM Pronangkis) dan diajukan ke PjOK untuk mencairkan dana BLM

b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas

c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan;

d. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka

e. Mengembangkan jaringan LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya.

f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UP-UP LKM.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pasal 11

Fungsi

a. Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;

b. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb);

c. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan

penanggulangan kemiskinan serta pembangunan;

d. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan;

e. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;

f. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat Desa; serta

g. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah.

Pasal 12

Tanggungjawab

Menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat Desa

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota Pimpinan Kolektif LKM

1) Anggota Pimpinan Kolektif LKM adalah warga yang tinggal di Desa Sumberharjo yang memenuhi kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang telah ditetapkan warga dan dipercaya warga untuk mengemban amanat masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

2) Anggota Pimpinan Kolektif LKM menggambarkan keterwakilan nilai-nilai kemanusiaan, bukan keterwakilan wilayah, golongan, maupun kelompok tertentu.

Pasal 14

Jumlah Anggota LKM

Anggota Pimpinan Kolektif LKM berjumlah ganjil minimal 9 (sembilan) atau sebanyak-banyaknya 13 (Tiga belas) orang.

Pasal 15

Koordinator Pimpinan Kolektif LKM

1) Untuk memudahkan pengkoordinasian, anggota Pimpinan Kolektif LKM dapat memilih dan mengangkat salah seorang di antara anggota Pimpinan Kolektif LKM untuk menjadi koordinator yang disebut Koordinator Pimpinan Kolektif LKM.
2) LKM tidak mengenal hirarki, tiap anggota memiliki hak yang sama, oleh karena itu semua keputusan dilakukan secara kolektif dan Koordinator Pimpinan Kolektif LKM tidak dapat mengambil keputusan sendiri dengan mengatasnamakan LKM.
3) Koordinator Pimpinan Kolektif LKM dipilih dari dan oleh anggota Pimpinan Kolektif LKM.
4) Koordinator Pimpinan Kolektif LKM dipilih ulang secara periodik yang waktunya ditentukan oleh anggota Pimpinan Kolektif LKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pasal 16

Masa Bakti LKM

1) Anggota Pimpinan Kolektif LKM dipilih untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, dengan tiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat dilakukan penggantian serta dapat dipilih ulang.
2) Bilamana salah seorang anggota Pimpinan Kolektif LKM non-aktif karena mengundurkan diri atau diberhentikan dan atau meninggal

dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka anggota Pimpinan Kolektif LKM lainnya mengadakan Rembug Khusus untuk menetapkan anggota pengganti yang berasal dari nama hasil Rembug Warga tingkat Desa sebelumnya yang memperoleh peringkat tertinggi dalam pemilihan anggota Pimpinan Kolektif LKM, tetapi tidak menjadi anggota Pimpinan Kolektif LKM, kemudian dipertimbangkan dan atau disahkan dalam Rapat Anggota LKM dan disampaikan dalam Sidang Rembug Warga Tahunan (RWT).

Pasal 17

Dalam menjalankan peran dan fungsi serta tanggungjawab, anggota Pimpinan Kolektif LKM bersifat relawan dan tidak menerima gaji atau imbalan yang bersifat insentif lainnya. Keperluan kegiatan LKM dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang bersifat kebutuhan administrasi, pertemuan-pertemuan, transportasi-akomodasi dan komunikasi dapat menggunakan alokasi dana operasional (BOP) LKM yang administrasinya dilaksanakan oleh Sekretariat.

Pasal 18

Prinsip Pendirian LKM

1) Sistem pemilihan Anggota Pimpinan Kolektif LKM adalah pemilihan langsung secara rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye atau rekayasa.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2) Kriteria Anggota Pimpinan Kolektif LKM ditentukan sendiri oleh warga melalui refleksi kepemimpinan dengan berbasis nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan.
3) Pemilihan Anggota Pimpinan Kolektif LKM dimulai dari pemilihan utusan di tingkat RT dilanjutkan ke tingkat Desa.
4) Pemilihan dan penetapan utusan di tiap-tiap RT dilakukan oleh minimal 30% penduduk dewasa laki-laki maupun perempuan, termasuk didalamnya warga miskin.
5) Pemilihan utusan di tiap-tiap RT bersifat pemilihan langsung secara rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye atau rekayasa.
6) Jumlah seluruh utusan dari tiap-tiap RT apabila dijumlah dalam lingkup satu Desa berjumlah minimal 2% dari seluruh jumlah penduduk dewasa yang ada di Desa.
7) Semua warga dewasa di Desa bersangkutan berhak untuk memilih sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.
8) Semua warga dewasa di Desa bersangkutan yang memenuhi kriteria, mekanisme dan ketentuan yang disepakati berhak untuk dipilih.
9) Setiap pemilih tidak diperkenankan untuk diwakilkan atau dikuasakan dengan alasan apapun.
10) Setiap pemilih tidak diperkenankan untuk mewakili golongan, ras, agama, jabatan atau kepentingan lainnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pasal 19

Tata Cara Pendirian LKM

1) Sosialisasi pendirian LKM
2) Membentuk panitia pembangunan LKM terdiri dari kelompok kerja (pokja) pemilihan, Kelompok kerja (pokja) pemantau dan kelompok kerja (pokja) penyusunan draf tata tertib pemilihan dan draft Anggaran Dasar LKM
3) Penyusunan tata tertib pemilihan anggota Pimpinan Kolektif LKM dan draft anggaran dasar .
4) Pemilihan utusan dari tingkat RT, yaitu pemilihan utusan warga dari tiap-tiap RT yang akan dikirim dan diutus untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota Pimpinan Kolektif LKM pada pemilihan tingkat Desa.
5) Pemilihan Anggota Pimpinan Kolektif LKM di tingkat Desa dan pengesahan oleh Panitia Pembangunan LKM atas nama warga Desa.
6) Sosialisasi nama Pimpinan Kolektif LKM terpilih melalui berbagai macam media di seluruh Desa/Desa.
7) Pencatatan Anggaran Dasar LKM ke Notaris.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB VIII

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 20

Perangkat organisasi LKM terdiri dari :

1) Sekretariat, sebagai unsur pelaksana harian dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM.

2) Pengawas, Pengawas UPK berjumlah tiga atau lima orang dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan, diangkat untuk melakukan proses pengawasan, monitoring, evaluasi maupun audit internal kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM.
3) Unit Pengelola Keuangan (UPK), berjumlah dua atau empat orang dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan,diangkat untuk mengendalikan keuangan dalam kegiatan ekonomi/perguliran dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM dan Pengawas UPK.
4) Unit Pengelola Lingkungan (UPL), diangkat untuk mengendalikan kegiatan lingkungan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM
5) Unit Pengelola Sosial (UPS), diangkat untuk mengendalikan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota Pimpinan Kolektif LKM
6) Unit pengelola kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pasal 21

1) Perangkat organisasi LKM diangkat oleh Pimpinan Kolektif LKM dan berperan menjalankan kebijakan/keputusan yang ditetapkan oleh LKM.
2) Personil perangkat organisasi LKM adalah warga dari Desa Pacitan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LKM.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3) Perangkat organisasi LKM bertanggung jawab kepada Pimpinan Kolektif LKM.
4) Perangkat organisasi diangkat dengan menerbitkan surat pengangkatan atau surat keputusan LKM.
5) Tugas, wewenang, tanggung jawab, dan insentif untuk perangkat organisasi LKM ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif LKM dalam suatu kontrak kerja dan diatur dalam ART.

Pasal 22

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Perangkat Organisasi LKM

1) Pengurus perangkat organisasi LKM diangkat dan diberhentikan oleh LKM sesuai dengan kebutuhan dalam rapat Pimpinan Kolektif LKM. Hasil rapat diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai media warga, setidak-tidaknya ditempel di 5 (lima) tempat strategis dengan masa sanggah 7 (tujuh) hari.
2) Kontrak kerja pengurus perangkat organisasi LKM berlaku untuk maksimal 1 (satu) tahun. Jika kinerja dari seorang pengurus perangkat organisasi LKM dianggap baik selama masa kontrak 1 (satu) tahun tersebut, maka orang tersebut dapat kembali dikontrak untuk tahun-tahun berikutnya dimana jangka waktu kontrak ditetapkan oleh LKM.

Pasal 23

Anggota Pimpinan Kolektif LKM tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus perangkat organisasi LKM.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IX
HUBUNGAN KELEMBAGAAN
Pasal 24

Hubungan antara LKM dengan lembaga-lembaga lainnya di tingkat Desa adalah sebagai berikut:

1) Hubungan LKM dengan perangkat Desa dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat Desa, tidak bersifat struktural formal, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu sama lain.
2) Pimpinan Kolektif LKM berkewajiban menjalin hubungan yang harmonis dalam menjalankan peran, fungsi dan tanggungjawabnya dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Desa termasuk dengan pemerintahan Desa

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB X
RAPAT LKM dan REMBUG MASYARAKAT
Pasal 25
Rapat LKM

1) Rapat bulanan :

   LKM berkewajiban menyelenggarakan pertemuaan rutin anggota-angota LKM sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Rapat bertujuan selain membahas berbagai masalah dan perkembangan yang ada, juga membahas rencana LKM untuk bulan berikutnya. Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan LKM kepada KSM, masyarakat dan pemerintah Desa.

2) Rapat Triwulan :

LKM berkewajiban menyelenggarakan pertemuan koordinasi triwulanan dengan mengundang seluruh perangkat organisasi LKM, KSM, dan Forum Relawan (sebagai unsur masyarakat) untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan serta merencanakan kegiatan triwulan berikutnya.

3) Rapat Konsultasi Publik

a. Dalam hal LKM mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (misalnya; Peta Kemiskinan, Pronangkis, Pencairan dana BLM, KSM penerima manfaat dll), harus dikonsultasikan ke masyarakat melalui rapat konsultasi publik

b. Hasil keputusan rapat konsultasi publik yang ditetapkan oleh LKM harus disebarluaskan kepada masyarakat melalui penempelan di tempat-tempat strategis.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pasal 26

Rembug Warga

1) Rembug Warga Tahunan :

a. LKM wajib menyelenggarakan Rembug Warga Tahunan yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali.

b. Rembug Warga Tahunan LKM membahas :

1. Pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan (termasuk penyampaian hasil audit)

2. Pergantian anggota LKM yang tidak aktif

3. Pengesahan hasil-hasil review partisipatif
4. Pengesahan program kerja LKM tahun berikutnya.

c. RWT dihadiri setidaknya dihadiri oleh LKM, utusan-utusan warga, perangkat Desa/Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan warga miskin dan perempuan setempat.

d. Pertanggungjawaban LKM dapat diterima dan atau ditolak oleh peserta rembug warga tahunan

2) Rembug Warga Istimewa :

a. Rembug Warga Istimewa dapat dilakukan bila :

1. Adanya indikasi penyimpangan dana dan/atau pelanggaran terhadap AD/ART oleh LKM
2. Pimpinan kolektif LKM terlambat melaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT) untuk menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan (LPJT) lebih dari 6 bulan dari tutup buku tahunan atau melewati tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
3. Pimpinan Kolektif LKM tidak bisa menjalankan peran, fungsi dan tanggungjawab.
4. Keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada RWT.
5. Keadaan ketika perubahan AD harus segera dilakukan karena adanya ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengharuskan perubahan tersebut.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

6. LKM bersedia diperiksa, diaudit atau dimonitor oleh tim Review Keuangan, tim Audit Independen, BPKP, Badan Pengawas Daerah atau Tim Proyek/Program atau Konsultan yang berwenang.

b. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan Rembug Warga Istimewa diatur dalam ART.

Pasal 27

Quorum Rapat

1) Quorum Rapat LKM

a. Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari ½ dari jumlah anggota LKM ditambah 1 atau ketentuan lain yang akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) LKM.

b. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

2) Quorum Rembug Warga Tahunan Dan Istimewa

a. Rembug Warga dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah undangan yang sudah ditentukan.

b. Apabila ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi maka Rembug Warga ditunda selama satu jam.

c. Apabila ayat 2 pasal ini tidak tercapai maka Rembug Warga bisa diselenggarakan bila jumlah utusan warga yang hadir paling

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

sedikit 40% dari jumlah undangan yang sudah ditentukan dan dua pertiga dari undangan yang hadir tersebut menghendaki untuk dilaksanakan.

d. Apabila ayat 3 pasal ini tidak tercapai maka Rembug Warga ditunda dan dijadwalkan ulang.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 28

Sumber Dana

Sumber Dana LKM terdiri atas:

1) Modal sendiri yang berasal dari dukungan atau swadaya masyarakat.
2) Dukungan dari Pemerintah, di antaranya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari program pemerintah.
3) Kegiatan/program/proyek/lembaga lain untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
4) Kegiatan-kegiatan lain oleh lembaga sendiri yang sah.
5) Alokasi laba dari Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Pasal 29

Pengelolaan Dana

1) Dana LKM disimpan dalam rekening Bank Pemerintah atas nama LKM Bangun Mandiri Sejahtera yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Anggota Pimpinan Kolektif LKM.
2) Seluruh transaksi keuangan LKM dicatat dalam pembukuan Sekretariat LKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3) Dana LKM yang bersifat nirlaba atau non-profit adalah milik masyarakat Desa dan dikelola oleh LKM melalui Sekretariat LKM, dengan model pembukuan nirlaba.
4) Dana LKM yang bersifat dana bergulir adalah milik masyarakat Desa dan dikelola oleh LKM melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) LKM yang merupakan unit penghasil laba, dengan model pembukuan sesuai yang ditetapkan oleh program/pemerintah melalui konsultan pendamping.
5) Untuk kepentingan dana pinjaman bergulir, LKM memiliki Rekening Bank atas nama UPK-LKM Sumber Makmur atau UPK-LKM Sumber Makmur yang secara harian bukunya/rekening korannya dipegang dan dicatat oleh UPK, dimana penandatangan rekening ini adalah 1 orang UPK dan 2 (dua) orang Anggota Pimpinan Kolektif LKM apabila aset dana pinjaman bergulir kurang dari atau sama dengan Rp. 150.000.000,-. Sedangkan jika aset dana pinjaman bergulir lebih dari Rp. 150.000.000,- maka UPK LKM dapat membuka rekening bank atas nama UPK-LKM Sumber Makmur atau UPK-LKM Sumber Makmur dengan penandatanganan specimen 2 (dua) orang UPK dan 1 (satu) orang Anggota Pimpinan Kolektif LKM.
6) Dana LKM yang bersifat nirlaba atau non-profit antara lain dana sosial, dana prasarana lingkungan/infrastruktur, dana BOP dan modal dana pinjaman bergulir yang belum diserahkan ke UPK

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

merupakan "aktiva bersih terikat maupun tidak terikat" seluruhnya dikelola oleh LKM melalui Sekretariat LKM.

Pasal 30

Pemanfaatan Dana

1) Dana LKM dimanfaatkan bagi kepentingan penanggulangan kemiskinan di Desa Sumberharjo
2) Dana LKM tidak boleh disimpan dalam bentuk deposito dan jenis lainnya yang dilakukan untuk pemupukan dana.
3) Dana LKM tidak boleh dijadikan jaminan utang.
4) Sumber dana untuk administrasi dan operasional LKM dapat dibiayai dari alokasi dana BOP yang berasal dari pihak luar (eksternal) berupa bantuan operasional pemerintah, sumbangan swasta maupun sumbangan swadaya.
5) Pinjaman digulirkan pada KSM oleh UPK untuk kegiatan ekonomi produktif dengan jasa sebesar sekurang-kurangnya 1,5% tetap per bulan.
6) Laba bersih akhir tahun dari pengelolaan dana pinjaman bergulir dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dana Penambahan atau Pemupukan Modal UPK LKM
   b. Dana Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
   c. Dana Opersional LKM (Dana BOP LKM), termasuk didalamnya dapat untuk membiayai audit dan LPJ Tahunan LKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

d. Kegiatan Sosial Masyarakat Desa

e. Dana Pengawasan

f. Reward bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berprestasi

7) Sumber dana untuk administrasi dan operasional LKM dapat dibiayai dari alokasi dana BOP dari dalam organisasi (internal) yang berasal dari sebagian laba bersih yang merupakan laba bersih akhir tahun atas seluruh pendapatan-pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya-biaya dari pengelolaan dana pinjaman bergulir yang dihasilkan/dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) LKM.

Pasal 31

Transparansi dan Akuntabilitas

1) LKM dan perangkat organisasinya berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan transparansi dan akuntabilitas.

2) Pembukuan keuangan oleh Sekretariat maupun UPK-LKM terbuka untuk diketahui oleh seluruh masyarakat.

3) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat Desa dan kelompok peduli di luar Desa melalui :

a. Penyebaran informasi tentang kegiatan LKM

b. Rapat-rapat

c. Review keuangan oleh tim review keuangan yang disepakati masyarakat.

d. Audit LKM oleh auditor independen dan BPKP.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

e. Monitoring, supervisi, dan evaluasi setiap kegiatan oleh kelompok peduli.

f. Kotak-kotak pengaduan.

4) LKM wajib mengadakan audit tahunan oleh auditor independen yang berkedudukan di luar Desa Sumberharjo.

4. Sarana dan Prasarana Lembaga Keswadayaan Masyarakat

LKM desa Sumberharjo terletak di desa Sumberharjo, mempunyai kantor/sekretariat yang terletak di samping balai desa Sumberharjo, dan masih jadi satu dengan balai PKK, kantor LKM mempunyai luas ukuran 20 m^2. Kantor LKM mempunyai almari 1 buah, 1 buah komputer, 1 buah printer, 1 buah modem sebagai penungjang kinerja LKM.

5. Standar Penilaian Kinerja LKM

Standar Penilaian kinerja LKM yaitu tingkat perkembangan organisasi LKM yang dilakukan di setiap tiga bulan sekali. Indikator yang menjadi penilaian terdiri dari beberapa bidang yaitu:

1. Status Organisasi (visi misi, struktur organisasi)
2. Kepemimpinan (legalitas pemilihan anggota LKM, pengambilan keputusan, perempuan dalam pengambilan keputusan, mekanisme minta usulan masyarakat, partisipasi anggota LKM, pertemuan LKM)
3. Sistem manajemen (perencanaan, monitoring evaluasi,dokumentasi informasi, penanganan pengaduan masyarakat,penerima manfaat kegiatan/program)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4. Sumber daya keuangan (sumber pendanaan, rencana keuangan, pertanggungjawaban)
5. Sumber daya manusia (pengembangan kapasitas, kaderisasi)
6. Hubungan eksternal (KSM, masyarakat, pemerintah,organisasi non pemerintah)

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan dijabarkan mengenai Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman LKM Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Identifikasi Faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa Sumberharjo

a. Faktor Kekuatan LKM Desa Sumberharjo

1) Proses Pemilihan LKM

Pada proses pemilihan LKM desa Sumberharjo dilakukan dengan cara rembug warga yaitu dari proses pembentukan panitia, kemudian dilakukan rembug di tingkat RT dan kemudian di tingkat desa. Proses rembug yang dilakukan oleh LKM desa Sumberharjo dikatakan kekuatan karena mempunyai unsure-unsur demokrasi. Dan proses terbentuknya berdasarkan kerelawanan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Gambar 4.2
Diagram Alir Kegiatan Pembentukan LKM

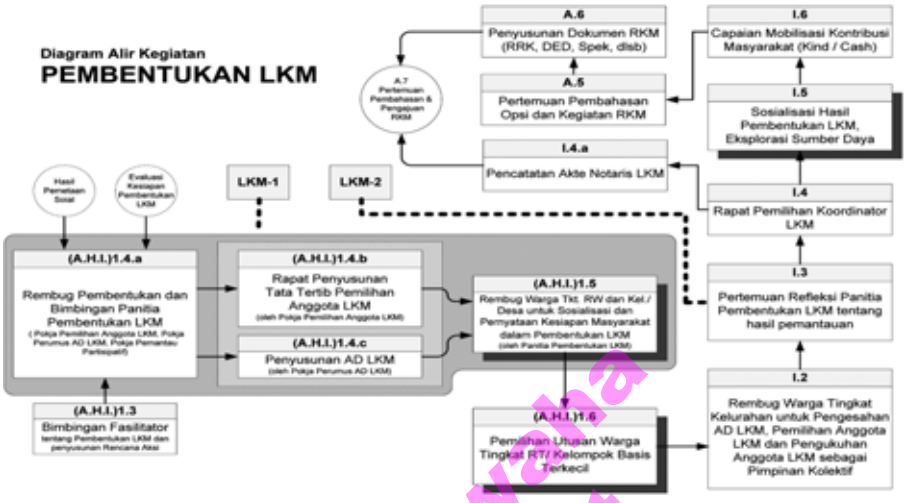

2) Kuantitas Sumber Daya Manusia

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) mempunyai kekuatan dalam hal kuantitas Sumber Daya Manusia dikarenakan LKM mempunyai pengurus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar LKM, bahwa LKM terdiri atas 9-13 orang, dari sini LKM mempunyai kuantitas Sumber daya manusia yang mencukupi sesuai kebutuhan Program. Dimana datanya sebagai berikut :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.1
Tabel Anggota Pengurus LKM

No	Nama	L/P	Umur	Tingkat Pendidikan	Pe kerjaan	Jabatan di LKM
1	M Farid Kuncoro	L	54	S1	PNS	Koordinator
2	Suro Basuki	L	45	SLTA	Swasta	Anggota
3	Dewi Herlina	P	34	S1	Swasta	Anggota
4	Anang Purwanto	L	37	S1	Swasta	Anggota

No	Nama	L/P	Umur	Tingkat Pendidikan	Pe kerjaan	Jabatan di LKM
5	Edy Santoso	L	37	S1	PNS	Anggota
6	Tri Agus S	L	41	SLTA	Swasta	Anggota
7	Eko Nur Wahid	L	40	S1	Swasta	Anggota
8	Pujo Winarko	L	40	SLTA	Swasta	Anggota
9	Ida Royani	P	47	SLTA	Swasta	Anggota
10	Sobini	L	45	S1	Swasta	Anggota
11	Sugiarto	L	48	SLTA	Swasta	Anggota
12	Iswahyudi	L	40	SLTA	Swasta	Anggota
13	Suprapti	P	39	S1	Wiraswasta	Anggota

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3) Faktor Kelemahan

a) Sarana dan Prasarana

Lembaga keswadayaan masyarakat desa Sumberharjo mempunyai kantor yang masih menjadi satu dengan kantor PKK dalam artian pengurus tiidak rutin untuk menempati kantor LKM. Padahal fungsi kantor LKM sangat diperlukan sebagai upaya masyarakat untuk saling merasa memiliki dengan adanya organisasi LKM dan KSM yang akan melakukan angsuran dengan mudah mencari tempat untuk melakukan transaksi keuangan dana perguliran. Almari 1 buah sehingga dokumen tidak cukup tertata di almari. Komputer belum digunakan maksimal.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia pada LKM desa Sumberharjo termasuk kategori kelemahan karena tidak ada separuh dari pengurus berpendidikan tinggi, karena pada proses kaderisasi pemilihan anggota LKM, syarat menjadi anggota LKM adalah tidak menyebutkan adanya pendidikan terakhir tetapi cukup dengan bekal jujur, sehingga jika kualitas pada tingkat pemahaman tentang organisasi dan penanganan kumuh masih sangat kurang. Kemudian perangkat organisasi LKM yang seharusnya memadai dalam kualitas pendidikan, akan tetapi dalam perangkat organisasi belum mencerminkan kualifikasi yang ada. Perangkat organisasi terutama UPK dan sekretariat tidak berpengalaman di bidang keuangan, sehingga perlu proses pembelajaran.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c) Kinerja Keuangan

LKM seharusnya menjadi monitoring dalam proses pengelolaan keuangan baik dari perencanaan maupun pelaksanaan program, sehingga kinerja keuangan bisa baik. Akan tetapi kinerja keuangan di LKM desa sumberharjo masuk pada kategori kelemahan karena tingkat pengembalian ekonomi bergulir sangat rendah.

Berikut datanya tingkat pengembalian ekonomi bergulir (RR)

Gambar 4.3
Grafik Pengembalian Ekonomi Bergulir

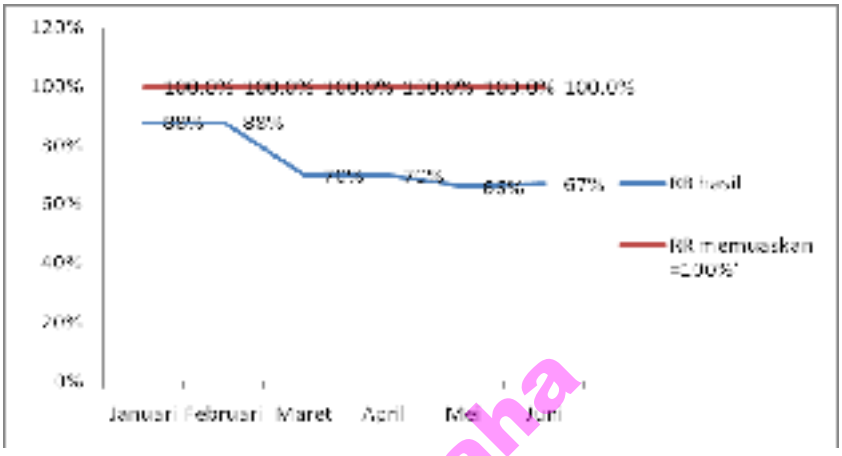

d) Kepemimpinan dalam pertemuan LKM

Koordinator adalah orang yang mengkoordiner anggotanya dalam pertemuan-pertemuan rutin, Koordinator kurang begitu aktif dalam mengkoordiner anggotanya dikarenakan banyaknya kesibukan yang harus ditangani sehingga proses organisasi tidak berjalan dengan maksimal. Seharusnya jika koordinator tidak bisa aktif di setiap kegiatan bisa dilakukan oleh anggota lainnya karena sifatnya pimpinan kolektif. Akan tetapi proses kepemimpinan ini belum bisa dimaknai secara mendalam.

e) Tidak adanya honor LKM

LKM adalah lembaga keswadayaan, karena swadaya, LKM bekerjapun tidak ada honornya. Karena tidak ada honor dalam melakukan pekerjaan, bekerja dengan maksimal tidaklah mau karena berdasarkan situasi kerelawanannya sehingga LKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

tidak dapat dipaksa melakukan kegiatan kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Walaupun semestinya diawal sudah memahami kalau tidak ada honor dan bekerjanya kerelawanan, akan tetapi LKM tidak membayangkan kegiatan-kegiatan yang rumit dan membutuhkan tenaga dan biaya. Sehingga hal ini merupakan kelemahan di LKM.

f) Loyalitas Keanggotaan LKM

Loyalitas keanggotaan LKM ditandai dengan jumlah yang hadir pada rapat rutin LKM, rapat rutin LKM dalam Anggaran Dasar LKM pasal 27 disebutkan quorum rapat LKM apabila dihadiri 50% +1 dari anggota LKM. Akan tetapi masih rendahnya tingkat kehadiran LKM tersebut.

Gambar 4.4
Diagram Tingkat Kehadiran Rapat LKM

g) Requetmen perangkat Organisasi LKM

Proses requetmen perangkat organisasi LKM desa Sumberharjo (UPK,sekretariat,UPL,UPS,Dewan Pengawas) sesuai AD LKM pasal 21 bahwa perangkat organisasi LKM

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

diangkat oleh LKM dan diberhentikan oleh LKM. Perangkat organisasi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LKM. Karena proses requetmen yang seharusnya dilakukan melalui pengumuman ke masyarakat dan melewati pendaftaran dan seleksi oleh LKM akan tetapi yang terjadi di LKM desa Sumberharjo perangkat organisasi hanya dilakukan siapa yang bersedia, maka perangkat organisasi tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh LKM semua di karenakan keterpautan upah yang sedikit yang diberikan LKM kepada perangkat organisasi.

4) Faktor Peluang

a) Dukungan Pemerintah

Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Lembaga Keswadayaan Masyarakat mempunyai peluang yaitu pemerintah sebagai nakoda program. Pemerintah telah mendukung dengan adanya bantuan dana pelatihan untuk LKM,relawan, perangkat dan KSM. Pemerintah juga mendukung dalam pelaksanan kebijakan di LKM. Monitoring yang dilakukan oleh dinas terkait dan Pemerintah desa.

b) Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat yang sudah tersedia pada saat ini yaitu ketersediaan tenaga kerja masyarakat. Dukungan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

LKM, kemudian dukungan monitoring dan operasional pemeliharaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ksm lingkungan sangat mendukung dengan kegiatan LKM

c) Audit Independent

Setiap tahun LKM melakukan audit independent, tim audit independentpun memberikan hasil sesuai dengan penlaiannya. Karena audit independent merupakan syarat LKM dapat dipercaya oleh pihak lain. Dengan adanya hasil audit independent dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti CSR dan lain-lain.

5) Faktor Ancaman

a) Bencana Alam

Bencana alam merupakan factor ancaman bagi LKM karena di LKM terdapat program lingkungan yaitu pembangunan sarana fisik seperti rabat jalan dan lain-lain. Kegiatan seperti tersebut jika terjadi bencana maka akan terjadi kerusakan pada kegiatan fisik.

b) Gagal pemahaman

Tidak memahami aturan main yang ada, tidak memahami sosialisasi, tidak memahami program kota tanpa kumuh. Tidak memahami lembaga LKM itu sendiri. Bisa mengakibatkan program yang tidak tepat sasaran dan kebijakan yang keliru sehingga mengakibatkan peluang keruang tahanan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Pemberian bobot pada factor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

No	Kategori variable dan Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
Kekuatan				
1	Proses Pemilihan LKM	0.50	1	0.50
2	Kuantitas SDM	0.50	1	0.50
Total				**1**
Kelemahan				
1	Sarana dan prasarana	0.13	2	0.26
2	Kualitas Sumber Daya Manusia	0.07	1	0.07
3	Kinerja Keuangan	0.20	3	0.60
4	Kepemimpinan dalam pertemuan LKM	0.13	2	0.26
5	Tidak adanya honor	0.13	2	0.26
6	Loyalitas keanggotaan LKM	0.20	3	0.60
7	Requetmen perangkat organisasi LKM	0.13	2	0.26
Total				**2.31**
Peluang				
1	Dukungan Pemerintah	0.50	2	1
2	Dukungan Masyarakat	0.25	1	0.25
3	Audit Independent	0.25	1	0.25
Total				**1.5**
Ancaman				
1	Bencana Alam	0.50	1	0.50
2	Gagal pemahaman	0.50	1	0.50
Total				**1**

No	Kategori variable dan Indikator	Keterangan
Faktor Kekuatan		
1	Proses Pemilihan LKM	Dinilai 1 alasan karena proses pembentukan sesuai dengan aturan AD LKM dan capainnya pada 75% penduduk dewasa hadir pada forum pemilihan LKM.
2	Kuantitas SDM	Dalam AD LKM disyaratkan LKM terdiri dari 9-13 orang, di LKM desa Sumberharjo telah memenuhi standar kuantitas kelayakan pengurus LKM
Faktor Kelemahan		

STIE Widya Wiwaha Sangan Plagiat

No	Kategori variable dan Indikator	Keterangan
1	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan organisasi, maka di beri nilai 2 dan tidak dinilai sangat rendah karena masih ada ruang yang bisa dipakai buat kantor.
2	Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas sumber daya manusia tidak ada 50% yang berpendidikan tinggi, dan berpengalaman akan tetapi bisa dipupuk dengan cara dilatih maka nilainya rendah
3	Kinerja Keuangan	Pada tataran kinerja keuangan perangkat LKM dalam hal ini UPK tidak mampu secara maksimal mengelola keuangan terutama pada verivikasi kelaayakan KSM/Penerima manfaat. Akan tetapi di sekretariat masih mampu mengelola keuangan. Pengawas keuangan belum di fungsikan dengan baik oleh LKM.
4	Kepemimpinan dalam pertemuan LKM	LKM merupakan pimpinan kolektif, dimana koordinator mengkoordinasikan kepemimpinannya, jika berhalangan hadir harusnya anggota menggantikan. Tidak dinilai sangat gagal karena masih berjalan walau lambat
5	Tidak adanya honor	Dalam proses pendirian LKM sebenarnya sudah pada paham kalau tidak ada honor dalam LKM, akan tetapi dalam proses perjalananya pada mengeluh karena tidak ada transport untuk menghadiri pertemuan. Dinilai 2 karena tidak semua anggota LKM punya persepsi seperti tersebut
6	Loyalitas keanggotaan LKM	Loyalitas keangotaan LKM sangat rendah dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi
7	Requetmen perangkat organisasi LKM	Requetmen perangkat organisasi dilakukan tidak melalui mekanisme pendaftaran, akan tetapi penawaran.
Faktor Peluang		
1	Dukungan Pemerintah	Bahwa pemerintah telah mendukung dengan keberadaan LKM terbukti terdapatnya bantuan dana di tiap tahunnya. Pada tahun ini LKM

STIE Widya Wiwaha Jangan Plagiat

No	Kategori variable dan Indikator	Keterangan
		mendapatkan dana pelatihan. Dikatakan 2 karena tidak semua dana alokasi pengajuan LKM disetujui.
2	Dukungan masyarakat	Bahwa masyarakat telah mendukung dengan keberadaan LKM yaitu adanya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, bentuk dukungan masih berupa tenaga kerja
3	Audit Independent	Hasil audit independent merupakan peluang dalam rangka kemitraan atau kerjasama dengan lembaga lain
	Faktor Ancaman	
1	Bencana alam dan gagal paham	Dinilai rendah karena indikasi ketika terjadi bencana dan indikasi ketika proses sosialisasi tidak dilakukan oleh jajaran Konsultan dan pendamping ataupun relawan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Menentukan Posisi Lembaga Keswadayaan Masyarakat desa Sumberharjo.

Dalam menentukan posisi LKM desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan dilihat dalam salah satu kuadran dari empat kuadran yang dimiliki oleh matriks SWOT-4K, dan sekaligus menentukan strategi peningkatan kinerja LKM yang seyogjanya dilaksanakan berdasarkan posisi yang dimiliki. Untuk keperluan tersebut dihitung dahulu selisih nilai terimbang antara variable kekuatan dan kelemahan LKM sekaligus selisih nilai terimbang antara peluang dan ancaman LKM desa Sumberharjo. Dari hasil analisa SWOT-4K diperoleh:

Selisih Nilai Tertimbang pada LKM Desa Sumberharjo

Nilai Tertimbang kekuatan LKM	1.0
Nilai Tertimbang Kelemahan LKM	2.31
Selisih Positif	**(1.31)**
Nilai Tertimbang Peluang LKM	1.5
Nilai Tertimbang Ancaman LKM	1
Selisih Positif	**0,5**

Dari gambaran perhitungan tabel diatas diketahui bahwa selisih antara nilai tertimbang kekuatan organisasi dengan nilai tertimbang kelemahan organisasi adalah selisih negatif yakni 1,31 Sedangkan perhitungan nilai tertimbang peluang organisasi dengan nilai tertimbang ancaman organisasi adalah selisih positif yakni 0,5. Hal ini menunujukkan selisih kedua nilai tersebut negative dan positif , akibatnya posisi LKM desa Sumberharjo berada pada kuadran II. Secara visual posisi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Gambar 4.5

Posisi LKM dalam Matriks SWOT-4K

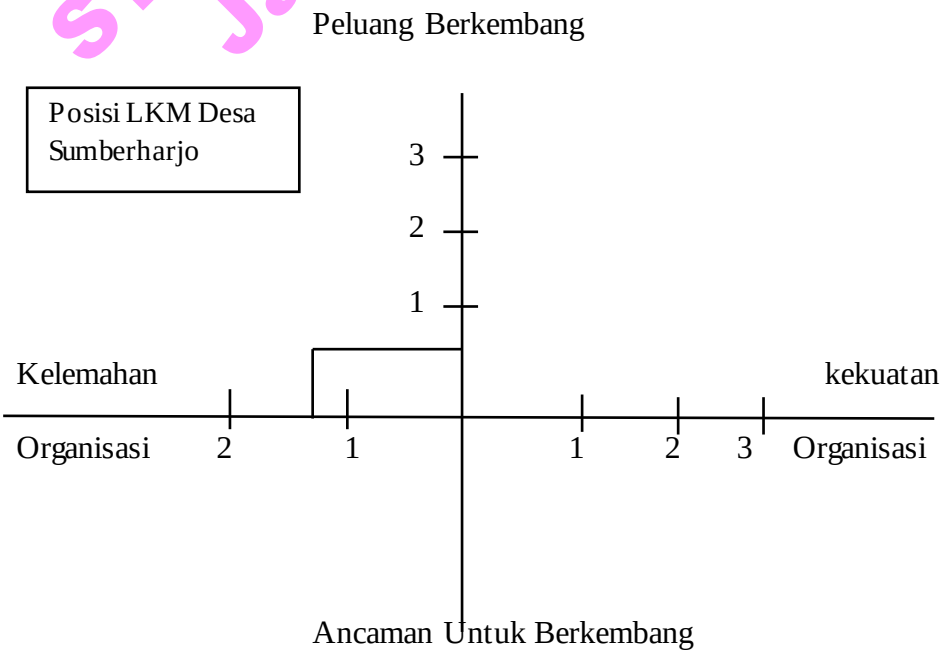

3. Strategi Peningkatan Kinerja LKM dalam Program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Melihat posisi LKM pada kuadran II, seyogyanya untuk menggunakan strategi stabilisasi karena LKM memiliki kelemahan yang cukup signifikan pada saat sesungguhnya masih terdapat peluang. Strategi ini juga dapat dilakukan dalam melakukan strategi bersaing dalam mempertahankan peluang yang ada untuk mengurangi kelemahan yang ada pada LKM.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan data yang telah diuraikan dan dilakukan pembahasan yang telah disampaikan penulis di dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis dapat memberi kesimpulan bahwa Strategi Peningkatan Kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam Program Kota Tanpa Kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan sebagai berikut:

1. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) desa Sumberharjo mempunyai kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman. Faktor kekuatan LKM Desa Sumberharjo yaitu proses pemilihan LKM , kuantitas Sumber Daya Manusia. Faktor kelemahan LKM yaitu sarana dan prasarana, Kualitas Sumber Daya Manusia. kinerja keuangan, Kepemimpinan dalam pertemuan LKM, tidak adanya honor, Loyalitas keanggotaan LKM, Requetmen perangkat organisasi LKM. Faktor peluang yaitu dukungan pemerintah,dukungan masyarakat, audit independent, Faktor ancaman yaitu bencana alam,gagal pemahaman.
2. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) desa Sumberharjo pada diagram analisis SWOT-4K diperoleh hasil nilai tertimbang kekuatan dengan nilai tertimbang kelemahan yaitu (1,31) dan nilai tertimbang peluang dengan nilai tertimbang ancaman diperoleh hasil 0,5 dengan demikian berdasarkan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

diagram analisis SWOT, LKM terletak pada kuadran II pada posisi kelemahan dan peluang

3. Strategi peningkatan kinerja Lembaga Keswadayaan masyarakat dalam program kota tanpa kumuh di desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan adalah strategi stabilisasi yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan yang ada.

B. Saran

1. Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) dapat menjadi renungan masukan dalam membuat strategi dengan cara mengoptimalkan peran kepemimpinan LKM sebagai kepemimpinan kolektif, melakukan pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kinerja keuangan dan memonitor kinerja UPK, menyadari pentingnya loyalitas kinerja LKM, menyadari kerelawanan karena tidak adanya honor dan melakukan proses requetmen perangkat organisasi sesuai prosedur.
2. Pemerintah sebagai peluang bagi LKM, dalam meminimalkan kelemahan LKM dan mengoptimalkan kinerja LKM sangat diperlukan bantuan dana untuk peningkatan SDM LKM, bantuan tenaga fasilitator bagi LKM dalam melakukan kinerja organisasi, Bantuan sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah sebagai nahkoda dalam program kota tanpa kumuh.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3. Peneliti mendapatkan masukan pola strategi yang relevan untuk di terapkan di LKM desa Sumberharjo sebagai strategi dalam peningkatan kinerja, yang kemudian sebagai bahan penelitian untuk peneliti lainnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar LKM Sumber Makmur Desa Sumberharjo no 11/18/III/SS/2013 tanggal 18 Maret 2013

Rahmawati Halim (2014),*Jurnal academica*.FISIP UNTAG

Bobsusanto 2015,*http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/10- pengertian - strategi-menurut-para-ahli-lengkap.html.* Diakses 10 September 2016

Fattah *(1999:19)*, https://www.coursehero.com/file/p5k41j3/c-Produktivitas-Produktivitas-menurut-Greeberg-Perbandingan-antara-totalitas, *Diakses 10* September *2016*

Dedi Rianto Rahadi (2010), *Manajemen kinerja Sumber Daya Manusia*, (Tempat Terbit):Tunggal Mandiri.

Kusdi(2009),*http://farichinfarich.blogspot.co.id/2014/02 /teori- dan- strategi-organisasi. html* Diakses 10 September 2016

LAN RI, 200:5 (Rahmawati Halim)Jurnal academica FISIP UNTAG, 2014

Mulyadi (2001), https://www.google.com/search?q=daftar+pustaka+mulyadi+artikel+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab#q=pengukuran+kinerja+mulyadi Diakses 10 September 2016

Gita Dinarianti (2016), *Jurnal pengukuran kinerja, UI*

Mahsun, Muhamad (2016) Pengukuran Kinerja Sektor Publik Malang BPFE -X

Materi dasar Pelatihan, 2016, OSP 6, Jawa Timur

Nurlaila,(2010:71) *www.kajianpustaka.com/2014/pengertian-indikator faktor – mempengaruh i-kinerja.html* Diakses 10 September 2016

Peran Pelaku Program Kota Tanpa Kumuh Keputusan, 2016, Kementerian PU dan perumahan rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya, Jakarta.

Profil Desa Sumberharjo tahun 2015, Pemerintah Desa Sumberharjo

Pearce dan Robinson (1997), http://staff.uny.ac.id/sites/default/ files/ pendidikan /utam i-dewi-mpp/konsep-manajemen-strategis.pptx.Diakses 10 September 2016

STIE Widya Wiwaha Jangan Plagiat

PMU-PNPM MP (2008*), Pedoman teknis pembentukan LKM*, Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh (2016), Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Umum dan Perumahan Rakyatnomor, Jakarta.

SOP Penilaian perkembangan organisasi LKM 2010, OSP 6, Jawa Timur

Sukmadinata,Nana Syaodih (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwarsono, M., (2008), *Matriks&Skenario dalam Startegi*, Yogyakarta :Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat